



Pemprov Kalbar Raih Opini WDP

■ Anggaran Gunakan Pergub



BPK mengapresiasi usaha-usaha perbaikan yang telah, dan akan dilakukan oleh Pemprov Kalbar atas Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2018.

I Dr. Heru Kreshna Reza
Auditor Utama Keuangan Negara



PONTIANAK, TRIBUN

Pemprov Kalbar resmi menerima hasil penilaian dari BPK RI terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018. Hasilnya, Pemprov Kalbar meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Sesaat setelah penyerahan penilaian BPK RI di Paripurna DPRD Kalbar, Senin (27/5), Auditor Utama Keuangan Negara I Dr. Heru Kreshna Reza mengatakan, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, diketahui bahwa pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018, anggaran Belanja disajikan sebesar Rp 4,69 triliun dengan realisasi sebesar Rp 4,38 triliun, dan anggaran Belanja Transfer disajikan sebesar Rp 739,014 miliar dengan realisasi sebesar Rp 961,408 miliar.

Dalam pelaksanaannya, diketahui terdapat pergeseran yang mengakibatkan realisasi belanja melampaui anggaran belanja, yang ditetapkan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang APBD TA 2018.

Realisasi belanja melampaui anggaran tersebut, bersifat material dan mempengaruhi penyajian laporan keuangan, yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp 296,63 miliar, dan Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp 262,85 miliar.

Pergeseran anggaran yang tidak ditetapkan dalam Perda Peruba-

han APBD TA 2018, dan realisasi belanja yang melampaui anggaran, tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. "Atas dasar tersebut, BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018," ujarnya.

Dirinya mengatakan hal itu menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2018, komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-nya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan masih perlu ditingkatkan, dan dalam melakukan perubahan penjabaran APBD.

"Selain itu perlu memedomani ketentuan yang berlaku, serta lebih optimal dalam berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD," ujarnya.

Ia juga mengingatkan kepada Pemprov Kalbar, bahwa setelah enam puluh hari penilaian la-

poran diterima wajib menindak lanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

Harapannya DPRD Kalbar sesuai dengan kewenangannya dapat membantu tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi agar kualitas laporan keuangan dapat terus ditingkatkan, dan masalah yang sama tidak terjadi lagi pada tahun berikutnya.

"BPK mengapresiasi usaha-usaha perbaikan yang telah, dan akan dilakukan oleh Pemprov Kalbar atas Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2018, yang sebagian besar sesuai dengan action plan yang dibuat oleh Gubernur Kalbar," ujarnya.

Kendati demikian masih ada yang perlu ditingkatkan agar terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan, dan pada tahun 2019 opininya dapat kembali menjadi WTP.

"BPK RI akan tetap mendorong Pemprov Kalbar untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sistematis dan konsisten," ujarnya. **(dan)**